

Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang

Digital Village and Financial Literacy of the Village Officials: Evidence from Aceh Tamiang

Fitriansyah^a, & Chaikal Nuryakin^{b,*}

^aMagister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

^bDepartemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

[diterima: 11 September 2018 — disetujui: 15 Desember 2019 — terbit daring: 12 Agustus 2021]

Abstract

Since 2014, to reach the poor for increasing financial inclusion, the government of Indonesia has been digitizing social benefits. Recently, local government has also been pushed to build a “Digital Village.” We argue that for such a program to succeed, a good level of financial and digital literacy of the village officials is necessary. We surveyed the village officials in 60 out of 215 Aceh Tamiang to examine their financial, digital, and DFS literacy. We find that the literacy of the village officials, on average, is low. The factors contributing to low financial literacy are age, level of education, and accessibility to financial and digital services.

Keywords: village official; financial literacy; digital financial services; financial inclusion

Abstrak

Sejak tahun 2014, Pemerintah mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui digitalisasi bantuan sosial. Perkembangan terbaru, pemerintah daerah juga didorong untuk membangun “Desa Digital”. Keberhasilan program ini menurut penulis, membutuhkan literasi keuangan dan literasi digital aparatur desa. Studi ini melakukan survei mengenai literasi keuangan, digital, dan keuangan digital dari aparatur desa di 60 desa dari 213 desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat literasi masih rendah, bahkan cenderung kurang. Penelitian ini menemukan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, dan akses terhadap keuangan digital memengaruhi tingkat literasi keuangan aparatur desa.

Kata kunci: aparatur desa; literasi keuangan; jasa keuangan digital; inklusi keuangan

Kode Klasifikasi JEL: G21; I30

Pendahuluan

Secara global, persoalan inklusivitas keuangan selalu mengancam kelompok *the bottom of the pyramid* atau 40 persen penduduk dewasa berpenghasilan terendah, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan hasil survei dan penelitian *Global Findex*¹ dari Demirgüç-Kunt *et al.* (2015) ter-

hadap kelompok dimaksud di Indonesia, diketahui hanya 22 persen dari total penduduk dewasa dari kelompok tersebut yang memiliki akun bank atau institusi keuangan formal lainnya atau layanan *mobile money*, di antaranya hanya 14 dan 11 persen yang melakukan penyimpanan dan peminjaman melalui akun tersebut dalam 12 bulan terakhir (*World Bank*, 2017).

Menyikapi persoalan tersebut, peningkatan kinerja dan fungsi layanan keuangan formal dan perbankan menjadi diperlukan. Teknologi digital yang telah

* Alamat Korespondensi: Gedung Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, Jln. Prof. Dr. Sumitro Djohadikusumo, Kampus Widjojo Nitisastro, UI Depok 16424. E-mail: chaikal.nuryakin@ui.ac.id.

¹<https://globalfindex.worldbank.org/>.

terbukti memiliki kontribusi positif pada berbagai aspek kehidupan dan dengan aplikasi yang tepat, disinyalir akan mampu meningkatkan kinerja dan fungsi suatu pelayanan. Menurut *European Commission* (2010), layanan digital dengan akses yang luas dan transparan berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, kepercayaan publik, dan kinerja ekonomi. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia dengan konsep elektronikfikasi atau digitalisasi model pembayaran (transaksi) dan akses ke sistem keuangan formal adalah salah satu bentuk adopsi teknologi digital pada layanan keuangan yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi persoalan inklusivitas keuangan di Indonesia. Sejak 2014, Pemerintah telah mendorong pendistribusian bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera yang berupa kartu uang elektronik (*electronic money [e-money]*) sekaligus menjadi upaya inklusivitas keuangan bagi masyarakat miskin atau berpendapatan rendah.

Di lain pihak, Program Desa Digital merupakan salah satu bentuk representasi gerakan dengan konsep dan tujuan sebagaimana tersebut di atas yang mengambil lingkup perdesaan sebagai target pelaksanaan dengan kawasan tempat kelompok *the bottom of the pyramid* biasa terdapat. Menurut Bank Indonesia (2016), model ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dari sisi biaya dan waktu, serta meningkatkan keamanan dan transparansi proses penarikan dana desa melalui otentifikasi penarikan dana berjenjang dan jejak transaksi yang dapat terekam bagi aparat desa, serta membuka peluang untuk terhubung dengan layanan keuangan formal bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan transaksinya sehari-hari. Lebih lanjut dikatakan, dengan terbiasa menggunakan layanan digital atau nontunai, kawasan perdesaan akan makin merasakan efisiensi bertransaksi dan inklusivitas keuangan dapat ditingkatkan.

Menurut Covey (2004), suatu kegiatan pemba-

ngunan memerlukan sinergitas atau keterpaduan berbagai komponen atau unsur yang terlibat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih lanjut menurutnya, sinergitas akan mudah tercapai bila komponen atau unsur dimaksud mampu berpikir sinergi, memiliki kesamaan persepsi, dan saling menghargai. Aparatur desa dan Bank Indonesia sebagai komponen atau unsur yang terlibat dalam implementasi GNNT dalam rangka keuangan inklusif di desa tentunya diharapkan dapat berpikir sinergi dan memiliki kesamaan persepsi secara konseptual terkait program serta saling menghargai peran masing-masing sesuai lingkup pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai level pemikiran sinergi, kesamaan persepsi, dan mengemban perannya secara ideal, aparat desa diharapkan memiliki literasi keuangan, digital, layanan keuangan digital (nontunai), dan hal esensial lainnya terkait konteks persoalan secara optimal guna memberi daya dukung terhadap implementasi program dimaksud pada kawasan perdesaan.

Harapan optimalisasi daya dukung yang akan diberikan oleh aparat desa guna kelancaran dan kesuksesan implementasi program sebagaimana maksud di atas dibayangi oleh beberapa bukti empiris yang meragukan kinerja dan kapasitas aparat desa, yakni dari mulai keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memengaruhi produktivitas dan kreativitas (Pejabat Pengelola Informasi Publik Lembaga Administrasi Negara [PPID LAN], 2008), fungsi aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal dikarenakan profesionalisme yang rendah, kurang kreatif, dan kurang inovatif (Asrori, 2014), serta kurangnya peran aparat desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Suangi, 2014) sehingga persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam meningkatkan pelayanan publik yang belum berjalan dengan baik (Sari, 2016).

Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Peraturan-

an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi dana desa sebesar ±Rp150 miliar dengan alokasi afirmasi sebesar ±Rp2,1 miliar. Berdasarkan rata-rata alokasi afirmasi terhadap jumlah total desa (213 desa), Kabupaten Aceh Tamiang berada pada peringkat ke-7 dari total 22 kabupaten/kota di Aceh. Statistik tersebut mencerminkan masih tingginya rasio desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi terhadap jumlah total desa di Kabupaten Aceh Tamiang, bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang sama-sama mekar di Aceh tahun 2002, Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan 2 dari 5 kabupaten/kota. Permasalahan lain terkait tata kelola dana desa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah ditemukannya kasus penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2016 oleh beberapa kepala desa sebagaimana disebutkan oleh salah seorang auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang yang dilansir pada laman berita *Aceh Journal National Network (AJNN.net, 2017)* yang mungkin disebabkan lemahnya sistem pengawasan tata kelola dana desa yang masih dilakukan secara konvensional.

Kondisi kabupaten dengan tipe kawasan perdesaan yang tergambar oleh jumlah desa yang relatif banyak, tingginya rasio daerah tertinggal dengan penduduk miskin, dan persoalan penyimpangan penggunaan dana desa menjadi perlu untuk dilakukan pengamatan proyeksi GNNT dalam rangka keuangan inklusif pada desa-desa di kabupaten ini. Lebih lanjut, representasi program dengan sasaran aparatur dan masyarakat desa, seperti *Project Desa Digital* yang diperkirakan akan terinisiasi dalam beberapa tahun ke depan di kabupaten ini membuat penelitian atau kajian mengenai literasi aparatur desa dalam esensinya sebagai daya dukung kelancaran dan keberhasilan implementasi program di kawasan perdesaan menjadi penting.

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat atau kemampuan literasi aparatur desa dalam bidang keuangan dan digital, khususnya terkait konteks persoalan, yaitu implementasi program GNNT dalam rangka keuangan inklusif di kawasan perdesaan. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat dan kemampuan literasi tersebut. Hasil dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam strategi penyusunan atau perencanaan kebijakan program terkait, baik secara khusus berupa implementasi program secara konkret dengan ruang lingkup terbatas pada Kabupaten Aceh Tamiang maupun secara umum dengan substansi dan ruang lingkup yang lebih luas, seperti kajian terhadap kapasitas aparatur desa secara nasional dan sebagainya.

Kajian literasi aparatur desa terkait kegiatan implementasi GNNT dalam rangka keuangan inklusif pada kawasan perdesaan, seperti *Project Desa Digital*, dapat dilihat berdasarkan pentingnya peran aparatur desa sebagai komponen utama pada kegiatan dimaksud serta konsep literasi itu sendiri yang menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* (2005) telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan luas sebagai instrumen yang berkontribusi terhadap pembangunan, pengembangan kapasitas sosial ekonomi, dan juga sebagai refleksi atas perubahan pribadi dan sosial. Secara garis besar, literasi dalam konteks ini berupa literasi keuangan dan digital dalam cakupan aspek kognitif yang menurut Gilster (1997), Lusardi & Mitchell (2007), Karpati (2011), dan Kharchenko (2011) berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemampuan (*skill*) menggunakan sesuatu hal terkait keuangan maupun digital, serta aspek nonkognitif berupa motivasi, kepercayaan, dan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, ketertarikan, dan kemauan individu untuk menggunakan dan mengikuti per-

kembangan (adaptasi), berkomunikasi, dan sikap atau perilaku positif lainnya terhadap sesuatu hal terkait keuangan dan digital (Potter, 2015; *Organisation for Economic Co-operation and Development* [OECD], 2013; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2014). Berdasarkan pemahaman di atas, maka literasi dalam konteks tulisan ini adalah serangkaian atribut kognitif dan nonkognitif bersifat mendasar terkait hal keuangan, digital, dan esensi keduanya secara terintegrasi yang perlu dimiliki secara optimal oleh aparatur desa guna memberikan sinergi dan daya dukung bagi implementasi GNNT dalam rangka keuangan inklusif di kawasan perdesaan.

Literasi keuangan dan digital aparatur desa selaku individu secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian Ansong & Gyensare (2012) menemukan faktor usia berpengaruh positif pada literasi keuangan. Chen & Volpe (1998) mendapati bahwa peserta dalam kategori usia 20–29 tahun dan 40 tahun ke atas memiliki pengetahuan terkait keuangan yang lebih baik dari kelompok usia lainnya. Menurut Agarwal *et al.* (2009), penambahan usia akan mengakumulasi pengetahuan keuangan berdasarkan pengalaman hidup praktis dan penurunan pengetahuan keuangan akibat penambahan usia mungkin disebabkan memburuknya fungsi kognitif. Sebaliknya dalam konteks digital, perbedaan usia berarti terdapat perbedaan kemampuan dalam menggunakan produk teknologi digital. Carrington & Marsh (2005) mengklaim bahwa perbedaan usia generasi menjadi faktor utama penyebab timbulnya perbedaan kemampuan ini. Penelitian lainnya oleh Mitzner *et al.* (2016) di Amerika Serikat juga mengindikasikan bahwa orang yang lebih tua memiliki lebih banyak kesulitan dalam belajar menggunakan dan mengoperasikan teknologi terkini seperti komputer, internet, perekam kaset video, mesin teller otomatis, dan sistem menu telepon. Survei *Pew Research Center* (2018) menyatakan bahwa 66 persen dari orang Amerika Serikat yang berumur di atas 65 tahun terkoneksi se-

cara daring dengan internet dibandingkan dengan 97 persen yang berumur antara 30–49 tahun. Fakta ini dikuatkan oleh pernyataan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2016) bahwa hanya 2 persen penduduk Indonesia berusia di atas 55 tahun yang menggunakan internet.

OJK (2014) menyebutkan jenis kelamin adalah salah satu faktor yang memengaruhi literasi keuangan. Margaretha & Pambudhi (2015) dalam penelitiannya menemukan faktor jenis kelamin memengaruhi tingkat literasi keuangan bahwa laki-laki relatif memiliki literasi keuangan personal yang lebih tinggi dikarenakan laki-laki tidak banyak mempertimbangkan variabel-variabel yang berhubungan dengan keputusan keuangannya. Wachira & Kihui (2012) dalam penelitian di Kenya juga menemukan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih tinggi dalam mengakses layanan keuangan formal. Terhadap literasi digital, penelitian Gui (2007) dan Hargittai & Hinnant (2011) sebelumnya telah menyoroti faktor gender yang memengaruhi perbedaan keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan dengan produk teknologi digital seperti *web*. Perempuan di banyak masyarakat jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk memiliki akses efektif terhadap *Information and Communications Technology* (ICT) (*World Bank*, 2000).

Investigasi Green & Riddell (2012) menemukan bukti yang kuat bahwa pendidikan formal secara substansial meningkatkan kemampuan kognitif yang merupakan penyumbang efektif terhadap kemampuan literasi. Hasil penelitian Wachira & Kihui (2012) menemukan hubungan positif antara tingkat pendidikan terhadap literasi keuangan. Begitu juga dengan OJK (2014) yang menyebutkan pendidikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi literasi keuangan. Hal yang sama juga terjadi terhadap literasi digital, bahwa tingkat pendidikan individu adalah faktor penting yang memengaruhi keterampilan digital (Gui, 2007; Hargittai & Hinnant, 2011).

Penelitian Ansong & Gyensare (2012) dan Ebiringa & Okorafor (2010) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan. Hal ini dikarenakan pengalaman, khususnya pada dunia kerja, akan mengakumulasi informasi yang diketahui terkait masalah keuangan. Terhadap hubungan pengalaman kerja dengan literasi digital, penelitian yang dilakukan oleh Eshet-Alkali & Chajut (2009) menemukan bahwa keterampilan literasi digital dipengaruhi oleh usia dan berubah dari waktu ke waktu. Begitu juga penelitian oleh Alkali & Amichai-Hamburger (2004) dan Hargittai (2005) yang menunjukkan alasan yang melatari perbedaan keterampilan digital individu terkait pengalaman pengguna dalam menggunakan teknologi. Dengan kata lain, pengalaman menggunakan teknologi setiap hari bertanggung jawab atas perubahan keterampilan digital individu (*Uni Assignment Centre [UAC]*, 2013:2).

Terhadap sisi aksesibilitas atau kemudahan dalam menjangkau dan memperoleh fasilitas atau layanan keuangan dan/atau digital dalam aktivitas sehari-hari, Wachira & Kihiu (2012) menyatakan bahwa jarak pemisahan dari bank menimbulkan tantangan besar pada akses untuk layanan keuangan formal. Beck *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan di suatu daerah berbanding lurus dengan jumlah *outlet* atau kantor cabang perbankan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di daerah tersebut. Dalam konteks jasa keuangan digital, akses jasa keuangan dan literasi keuangan akan meningkatkan tingkat adopsi (Villasenor *et al.*, 2016).

Metode

Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah total desa di Kabupaten Aceh Tamiang adalah 213 desa dengan aparatur desa yang menjadi target

atau prioritas penelitian adalah personal dengan status jabatan tertinggi pada setiap pemerintahan desa yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Jumlah populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 213 orang.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil bersumber dari aparatur desa dengan jabatan tertinggi pada setiap pemerintahan desa dengan sasaran atau prioritas berturut-turut, yaitu: kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), dan kepala urusan (kaur) dengan rencana kontribusi sampel adalah 1 aparatur untuk 1 pemerintahan desa. Untuk jumlah sampel sendiri berdasarkan atas formula dari Slovin (Yamane, 1967) untuk jumlah populasi yang terbatas yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + N * e^2)} \quad (1)$$

dengan n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, e adalah *margin of error* (5%).

Berdasarkan rumus di atas diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 34. Lebih lanjut, jumlah sampel minimal ini kemudian secara *ad hoc* yang diperbesar menjadi 60 sampel untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif untuk setiap klaster (lihat Tabel 2).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Cluster Stratified Random Sampling*. *Random sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mencampur objek-objek di dalam populasi sehingga semua objek dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Oleh karena hak setiap responden sama, tidak ada perlakuan berbeda dari populasi dalam terpilih sebagai sampel. Sementara itu, *Cluster Random Sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan terhadap *sampling unit* (individu) dengan *sampling unit*-nya berada dalam satu kelompok (klaster). Tiap unit (individu) di dalam kelompok yang terpilih

akan diambil sebagai sampel. Cara ini dipakai bila populasi dapat dibagi dalam kelompok-kelompok dan setiap karakteristik yang ditetapkan ada dalam setiap kelompok.

Adapun mekanisme penetapan *sampling* dengan teknik *Cluster Random Sampling* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuh indikator atau kriteria desa yang relevan dengan penelitian (lihat Tabel 1);
2. Mengidentifikasi setiap desa untuk setiap indikator masuk dalam kategori tinggi (T) atau rendah (R) sesuai parameter penilaian berdasarkan indikator atau kriteria yang terdapat pada setiap desa berdasarkan data *Potensi Desa 2014* (Podes 2014) – Badan Pusat Statistik (BPS) dan observasi lapangan;
3. Mengelompokkan setiap desa ke dalam 6 klaster berdasarkan jumlah kategori tinggi dan rendah yang diperoleh dari ketujuh indikator. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, terdapat 6 klaster dengan klaster 1 bisa dianggap sebagai desa yang paling maju dan klaster 6 sebagai desa yang paling terbelakang.
4. Penetapan jumlah sampel dari setiap klaster dilakukan secara proporsional dengan formula:

$$n = \frac{S_i}{S_t} \times N \quad (2)$$

dengan n adalah jumlah sampel dalam klaster (dibulatkan sampai dengan 0 digit desimal), s_i adalah jumlah desa dalam klaster, s_t adalah jumlah total desa, dan N adalah jumlah total sampel yang direncanakan.

5. Penentuan desa yang diambil sampel di setiap klaster dilakukan secara acak.

Variabel dan Model Penelitian

Pada dasarnya, konstruksi instrumen atau alat ukur penelitian mengadopsi: (1) materi survei lapangan penelitian pendahuluan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) terkait perkembangan inklusi keuangan (akses, penggunaan, dan kualitas) melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Lakupandai di Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Desember 2016 dan Januari 2017 (Nuryakin *et al.*, 2017); (2) instrumen atau alat ukur literasi keuangan dan keuangan inklusif oleh *OECD International Network on Financial Education* (OECD/INFE) (2015); (3) *Financial Inclusion Index* oleh Demirgüç-Kunt *et al.* (2015); dan (4) *A Global Measure of Digital and ICT Literacy Skills* oleh *Australian Council for Educational Research* (2016). Secara spesifik, tujuan dan objek penelitian ini terlebih ditinjau dari konteks persoalan, yaitu implementasi program GNNT dalam rangka keuangan inklusif di kawasan perdesaan yang merupakan hal baru dan belum adanya penelitian terdahulu terkait hal ini.

Peneliti menerapkan *mode of thought and inquiry* yang berdasarkan pada tinjauan teoretis dan empiris dengan hasil *mode of knowing* berupa asumsi, konsep, atau proporsi logis yang efektif sebagai landasan penyusunan instrumen atau alat ukur penelitian baru yang relevan terhadap konteks persoalan serta mampu memenuhi kebutuhan penelitian. Instrumen atau alat ukur tersebut berfungsi untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam pembentukan variabel penelitian.

Literasi aparatur desa yang menjadi variabel utama penelitian ini merupakan angka indeks, yakni hasil penilaian secara kuantitatif atas komponen literasi yang dianggap relevan dengan konteks persoalan: keuangan, digital (ICT), dan keuangan digital (nontunai). Setiap komponen memiliki indikator-indikator penilaian yang dianggap representasi literasi responden. Skor penilaian literasi responden terkait konteks persoalan adalah akumulasi skor setiap komponen literasi dengan jangkauan (*range*) skor penilaian 0–37 poin. Deskripsi penilaian literasi secara global maupun per komponen penilaian dapat dikelompokkan atas enam tingkatan kategori

Tabel 1. Parameter Penilaian Berdasarkan Indikator/Kriteria Desa

No.	Indikator_Kriteria	Sumber Data
1.	Tingkat pendidikan aparatur desa - T: Pendidikan Kades/Sekdes > SMU Sederajat - R: Pendidikan Kades/Sekdes s.d. SMU Sederajat	Podes 2014.Blok 1601
2.	Sinyal telepon seluler (minimal dua operator) - T: Sinyal kuat - R: Sinyal tidak ada atau lemah	Podes 2014.Blok 1005 & Observasi lapangan
3.	Fasilitas internet (kantor desa atau warnet di desa) - T: Ada - R: Tidak ada	Podes 2014.Blok 1007 & Observasi lapangan
4.	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk - T: Nonpertanian (industri/perdagangan/jasa dan lain-lain) - R: Pertanian	Podes 2014.Blok 404
5.	Fasilitas kredit yang diterima warga satu tahun terakhir dan keberadaan bank di wilayah desa - T: Ada - R: Tidak ada	Podes 2014.Blok 1214 & 1215
6.	Kegiatan peningkatan kapasitas perekonomian – dana bergulir simpan/pinjam untuk modal usaha - T: Ada - R: Tidak ada	Podes 2014.Blok 1401
7.	Jumlah surat miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu [SKTM]) yang dikeluarkan desa atau kelurahan selama tahun 2013** - 50 - R: < 50	Podes 2014.Blok 711

Keterangan: * T: Tinggi dan R: Rendah;

** Nilai median = 47 digenapkan menjadi 50.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Jumlah Sampel per Klaster

Klaster	Klaster		Sampel (N)		
	Jumlah Kategori "T"	Jumlah Kategori "R"	Desa	Hitung	Pembulatan
1	6	1	10	2,817	3
2	5	2	52	14,648	15
3	4	3	82	23,099	23
4	3	4	51	14,366	14
5	2	5	15	4,225	4
6	1	6	3	0,845	1
Jumlah			213		60

atau kriteria (Tabel 3).

Komponen literasi bagian keuangan diadopsi dari survei yang dilakukan *World Bank* yang memiliki jangkauan skor hasil penilaian 0–15 poin dengan indikator penilaian: (1) kemampuan menghitung secara numerik persoalan keuangan yang memuat tiga soal cerita yang masing-masing terkait dengan pendapatan, belanja, dan bunga pinjaman. Setiap jawaban benar bernilai 1 poin dan salah/tidak tahu bernilai 0 poin; (2) kepemilikan akun bank dengan nilai atas jawaban “ya memiliki” bernilai 1 poin dan “tidak memiliki” bernilai 0 poin; (3) intensitas

penggunaan layanan keuangan dengan komponen penilaian berupa siklus atau waktu aktivitas. Pilihan jawaban “tidak pernah”, “>6 bulan”, “6 bulan”, “3 bulan”, “sebulan”, dan “seminggu” secara berurutan bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4 poin; dan (4) sikap dan tindakan positif dalam menyesuaikan pengetahuan keuangan yang memuat dua pertanyaan, yaitu (a) minat atau ketertarikan terhadap hal-hal keuangan dengan nilai atas pilihan jawaban “tidak tertarik”, “tertarik”, dan “sangat tertarik” secara berurutan adalah 0, 1, dan 2 poin; dan (b) atensi atau mengikuti perkembangan dunia keuangan dengan pilihan jawaban “tidak pernah”, “jarang”, “kadang-kadang”, “sering”, dan “selalu” secara berurutan bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4 poin.

Komponen literasi bagian digital (ICT) memiliki jangkauan skor penilaian 0–12 poin dengan indikator penilaian: (1) penggunaan dan optimasi produk teknologi selular yang memuat dua pertanyaan, yaitu (a) jenis ponsel yang dimiliki dan digunakan dengan nilai atas pilihan jawaban “tidak ada”,

“ponsel biasa”, “*featurephone*”², dan “*smartphone*” secara berurutan adalah 0, 1, 2, dan 3 poin; dan (b) optimalisasi kegunaan dan manfaat ponsel yang dimiliki dengan jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” bernilai 0 poin; (2) menggunakan aplikasi media sosial (medsos) di ponsel sebagai sarana komunikasi, organisasi, dan pengembangan diri dengan jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” bernilai 0 poin; (3) penggunaan komputer atau laptop secara aplikatif dalam pekerjaan dengan pilihan jawaban “tidak pernah”, “hampir tidak pernah”, “jarang”, “kadang-kadang”, “sering”, dan “selalu” secara berurutan bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 poin; dan (4) kemampuan menggunakan komputer atau laptop sebagai *media player* dan mengakses internet dengan pilihan jawaban “tidak keduanya”, “salah satunya”, dan “ya keduanya” secara berurutan bernilai 0, 1, dan 2 poin.

Komponen literasi bagian *digital financial services* (DFS) memiliki jangkauan skor penilaian 0–10 poin dengan indikator penilaian: (1) kemampuan menggunakan teknologi digital sebagai instrumen nontunai dalam transaksi keuangan yang memuat tiga pertanyaan terkait kepemilikan dan penggunaan kartu bank serta pengalaman dan kemampuan memanfaatkan layanan *phone banking* dan *internet banking* dalam transaksi keuangan dengan setiap jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” bernilai 0 poin; (2) pengalaman transaksi barang atau jasa melalui media digital yang memuat dua pertanyaan terkait pengalaman membeli atau menjual barang/jasa melalui media digital secara daring dengan setiap jawaban “ya pernah” bernilai 1 poin dan “tidak pernah” bernilai 0 poin; (3) pengalaman keanggotaan layanan keuangan nontunai dengan jawaban “ya” bernilai 1 poin dan “tidak” bernilai 0 poin; serta (4) pengetahuan dan partisipasi pada GNNT dalam rangka keuangan inklusif yang me-

²*handphone* yang hanya memiliki kemampuan terbatas, seperti akses internet dan memainkan musik atau video, tetapi tidak memiliki fungsionalitas lainnya, misal menjalankan program aplikasi seperti pada *smarthphone*.

muat dua pertanyaan, yaitu (a) mengetahui layanan keuangan digital (nontunai) *e-money* dan lakupandai, dan (b) menggunakan layanan keuangan digital (nontunai) *e-money* dan lakupandai. Masing-masing pertanyaan memiliki pilihan jawaban “tidak keduanya”, “salah satunya,” dan “ya keduanya” yang secara berurutan bernilai 0, 1, dan 2 poin.

Literasi sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai variabel endogen (*dependen*), sementara usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa tugas/kerja ditetapkan sebagai variabel eksogen (*independen*). Informasi terhadap usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa tugas/kerja aparatur desa yang menjadi responden penelitian terdapat pada lembar kuesioner bagian identitas atau latar belakang. Variabel usia dan masa tugas/kerja menggunakan data interval dengan satuan ukuran “tahun”. Variabel jenis kelamin merupakan variabel *dummy* (laki-laki = 1 dan perempuan = 0). Bentuk data yang digunakan pada variabel tingkat pendidikan adalah hasil transformasi data ordinal ke bentuk interval melalui teknik *Method Successive Interval* (MSI).

Variabel eksogen (*independen*) lainnya yang disertakan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas. Pada konteks ini, aksesibilitas diartikan sebagai tingkat kemudahan yang didapatkan aparatur desa dalam aktivitas terkait keuangan dan/atau digital. Pada penelitian ini, aksesibilitas merupakan angka indeks 0–9 yang didapat berdasarkan penilaian terhadap kondisi atau ketersediaan kekuatan sinyal ponsel/internet desa/warung internet (*warnet*) di desa dengan jangkauan skor 0–3 dan jarak pusat desa terhadap kelompok pertokoan atau pusat perdagangan barang atau jasa digital dan fasilitas keuangan formal termasuk layanan keuangan *mobile* dengan jangkauan skor 0–6. Variabel ini tidak terdapat secara eksplisit pada lembar kuesioner. Sumber informasi dan data yang menjadi unit analisis atau alat ukuran variabel ini adalah data *Podes 2014* dan data observasi lapangan.

Tabel 3. Deskripsi Hasil Penilaian/*Scoring* Literasi Respondens Penelitian

Komponen Literasi Keuangan	Komponen Literasi Digital	Komponen Literasi DFS	Deskripsi Penilaian
Jangkauan Skor Penilaian (Poin)			
13,5–15,0	10,8–12,0	09,0–10,0	Sangat Baik
10,5–13,5	08,4–10,8	07,0–09,0	Baik
07,5–10,5	06,0–08,4	05,0–07,0	Cukup
04,5–07,5	03,6–06,0	03,0–05,0	Kurang
01,5–04,5	01,2–03,6	01,0–03,0	Buruk
00,0–01,5	00,0–01,2	00,0–01,0	Sangat Buruk

Analisis determinan terhadap variabel literasi telah diidentifikasi sebelumnya dalam bentuk atau model ekonometrika, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Literasi} = & \beta_0 + \beta_1 \text{usia} + \beta_2 \text{jenis_kelamin} \\ & + \beta_3 \text{tingkat_pendidikan} + \beta_4 \text{masa_tugas} \\ & + \beta_5 \text{Aksesibilitas} + \varepsilon \end{aligned} \quad (3)$$

Estimasi model menggunakan *ordinary least square* (OLS) dengan pengujian validitas melalui uji asumsi klasik: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Uji autokorelasi tidak dilakukan mengingat data dalam penelitian ini adalah berjenis *cross-section data*.

Hasil dan Analisis

Kunjungan ke desa-desa yang menjadi target penelitian mendapatkan 60 orang aparatur desa sebagai responden dengan karakteristik yang tersaji pada Tabel 4.

Berdasarkan akumulasi nilai setiap komponen literasi, didapatkan hasil skor total yang dianggap representasi kemampuan literasi aparatur desa. Gambar 1 menampilkan hasil tingkat literasi keuangan, literasi digital, dan literasi keuangan digital. Mayoritas aparatur desa, yaitu 27 orang atau 45 persen, memiliki nilai literasi keuangan dengan kriteria cukup dan terdapat 15 orang atau 27 persen dengan kriteria kurang atau lebih rendah. Literasi digital aparat desa lebih bervariasi dengan kriteria sangat baik sebesar 12 orang atau 20 persen dan sekitar 47 persen atau 28 orang dengan kriteria ku-

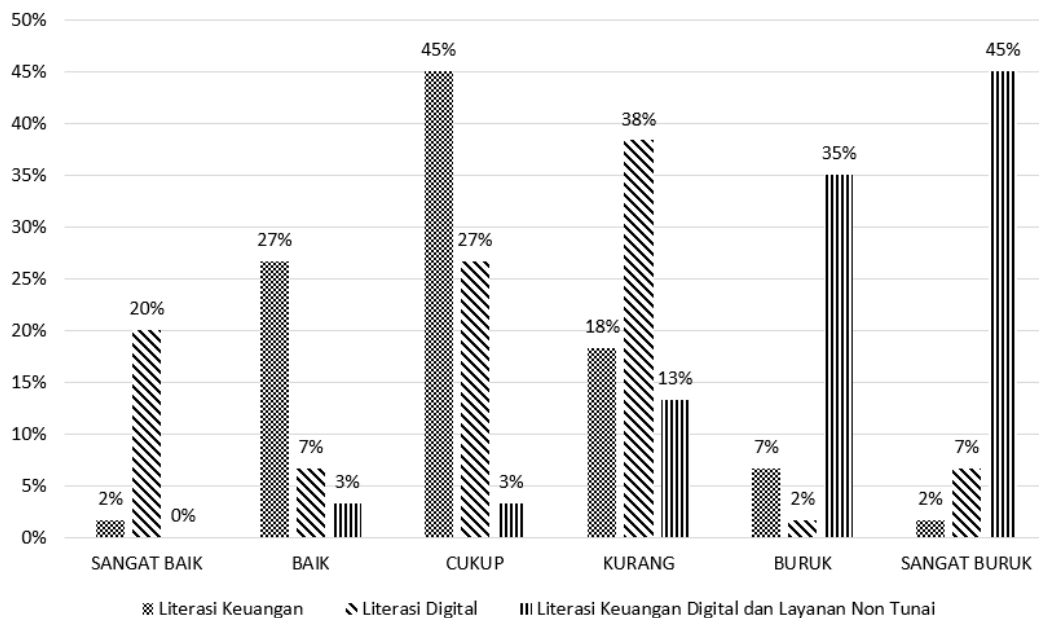
rang atau lebih rendah. Literasi keuangan digital menjadi literasi yang paling buruk dimiliki oleh aparatur desa. Sebanyak 56 orang atau sebesar 93 persen memiliki literasi keuangan digital yang kurang atau lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas aparatur desa belum memiliki akses dan pengetahuan terhadap layanan keuangan digital.

Untuk melihat pengaruh variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa tugas/kerja, dan aksesibilitas terhadap literasi dilakukan menggunakan model regresi linear berganda setelah seluruh tahapan uji asumsi klasik terlewati (Tabel 5). Hasil regresi linear berganda pada Model 1 menunjukkan bahwa variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan akses berkorelasi dengan kemampuan literasi keuangan secara signifikan. Pada Model 2, usia tidak berkorelasi dengan kemampuan literasi keuangan. Literasi keuangan menemukan variabel tingkat pendidikan dan aksesibilitas secara positif mampu memengaruhi variabel komponen literasi pada bagian keuangan, sementara variabel usia, jenis kelamin, dan masa tugas/kerja tidak memengaruhi. Model 3 menemukan variabel usia secara negatif dan aksesibilitas secara positif mampu memengaruhi variabel komponen literasi pada bagian digital secara signifikan, sedangkan variabel jenis kelamin dan masa tugas/kerja tidak memengaruhi.

Lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 2, penelitian ini menemukan bahwa aparatur desa yang berusia setahun lebih tua memiliki nilai yang lebih rendah sebesar 0,178 satuan pada tingkat literasi digital dan 0,082 pada tingkat literasi DFS.

Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian

Status jabatan	Kades 44 orang (73,3%)	Sekdes 12 orang (20%)	Kaur 4 orang (6,7%)						
Jenis kelamin	Laki-laki 91,67%	Perempuan 8,33%							
Usia	Termuda 20 tahun	Rata-rata 44 tahun	Tertua 66 tahun						
Kelompok usia	≥35 tahun 23,30%	36–45 tahun 33,30%	46–55 tahun 28,30%	>55 tahun 16%					
Tingkat pendidikan	SLTP 10%	SLTA 60%	D3 6,70%	S1/D4 20%	S2 3,30%				
Masa tugas/kerja	≥2,5 tahun 26,70%	2,5–5 tahun 30%	5–10 tahun 31,70%	>10 tahun 11,70%					
Nilai aksesibilitas	1 3,30%	2 6,70%	3 13,30%	4 11,7%	5 16,70%	6 16,70%	7 10%	8 18,30%	9 3,30%

**Gambar 1.** Detail Deskripsi Penilaian Literasi Aparatur Desa per Komponen Literasi (N=60)

Hal ini mengindikasikan timbulnya perbedaan atau tingkat literasi yang signifikan pada generasi yang berbeda (selisih usia 25–30 tahun). Temuan ini memiliki kesamaan pandangan dengan Carrington & Marsh (2005) yang menyebutkan faktor perbedaan generasi sebagai penyebab perbedaan kemampuan menggunakan produk teknologi digital. Sementara itu, faktor usia ditemukan tidak signifikan memengaruhi komponen literasi keuangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kontradiksinya indikator peni-

laian kemampuan menghitung secara numerik dan tindakan menyesuaikan pengetahuan keuangan yang membutuhkan fungsi kognitif dan minat belajar, yang merupakan keunggulan komparatif bagi orang-orang muda dengan item indikator penilaian kepemilikan akun bank dan intensitas penggunaan layanan keuangan sebagai representasi pengalaman praktis keuangan dan kondisi keamanan yang menjadi keunggulan komparatif bagi orang-orang yang relatif lebih tua.

Tabel 5. Determinan Tingkat Literasi Aparatur Desa

VARIABEL	MODEL			
	1	2	3	
	DEPENDEN			
	Literasi Keuangan	Literasi Digital/ICT	Literasi DFS	
INDEPENDEN	Usia	-0,038 (-1,269)	-0,178*** (-7,380)	-0,082*** (-3,739)
	Jenis kelamin	0,649 (0,527)	-1,249 (0,138)	1,165 (1,546)
	Tingkat pendidikan	1,146*** (3,225)	0,659** (2,280)	-0,156 (-0,594)
	Masa tugas/kerja	0,011 (0,119)	0,016 (0,223)	0,016 (-0,243)
	Aksesibilitas	0,488*** (3,454)	0,194* (1,693)	0,451*** (4,332)
	N	60	60	60
<i>R Square</i>	0,447	0,682	0,682	

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%
 ** signifikan pada taraf 5%
 *** signifikan pada taraf 1%

Penelitian ini juga menemukan bahwa aparatur desa dengan pendidikan formal setingkat lebih baik memiliki nilai yang lebih tinggi sebesar 1,146 satuan pada tingkat literasi keuangan, sebesar 0,659 satuan pada komponen literasi digital, dan tidak berpengaruh pada tingkat literasi DFS (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan literasi seiring meningkatnya capaian pendidikan formal. Temuan ini mendukung investigasi Green & Riddell (2012) yang membuktikan bahwa pendidikan formal secara substansial meningkatkan kemampuan kognitif yang merupakan penyumbang efektif terhadap kemampuan literasi.

Lebih lanjut, tingkat aksesibilitas berpengaruh dalam keseluruhan model, terutama dalam model literasi DFS. Hal ini mengindikasikan pentingnya akses atau ketersediaan layanan/fasilitas keuangan/digital. Temuan ini mendukung pernyataan bahwa jarak dari bank atau lembaga keuangan lainnya menimbulkan tantangan besar pada akses untuk layanan keuangan formal (Wachira & Kihiu, 2012) serta pernyataan *World Bank* (2000) dan Huang & Russell (2006) bahwa perbedaan literasi digital disebabkan ketidaksetaraan pada berbagai tingkat komputasi dan akses internet di antara individu.

Salah satu variabel yang disertakan pada model

regresi, namun ditemukan tidak signifikan memengaruhi literasi aparatur desa, adalah jenis kelamin. Dominasi laki-laki pada struktur jabatan aparatur desa tergambar dari rasio jumlah responden laki-laki terhadap perempuan yang mencapai 91,67 persen berbanding 8,33 persen atau 55 berbanding 5. Jumlah responden perempuan yang sangat sedikit diduga menjadi penyebab tidak signifikannya variabel tersebut memengaruhi variabel literasi. Ditambah uji formal yang akan menemukan fakta bahwa jabatan tertinggi aparatur desa di Kabupaten Aceh Tamiang selalu identik dengan laki-laki. Hal ini membuat penilaian literasi keuangan dan digital aparatur desa secara general berdasarkan kelompok jenis kelamin menjadi bias.

Variabel lainnya yang tidak signifikan adalah masa tugas/kerja. Penyebab yang cukup logis adalah tidak paralelnya peningkatan kemampuan literasi keuangan dan digital aparatur desa dengan pengetahuan keuangan dan digital yang didapat dari pengalaman bertugas atau bekerja. Hal yang cukup relevan dan wajar, mengingat program-program pemerintah terkait keuangan dan/atau digital dengan porsi besar dan berkepentingan langsung terhadap jabatan aparatur desa baru muncul pada beberapa tahun terakhir sehingga lamanya menjabat (beberapa

pa aparaturnya telah bertugas selama 5–10 tahun) tidak otomatis meningkatkan kemampuan literasi digital dan keuangannya.

Simpulan

Mayoritas aparaturnya masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kemampuan literasi aparaturnya di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mencukupi dalam era digital. Secara khusus, nilai aparaturnya yang buruk pada komponen literasi keuangan digital, sikap dan tindakan menyesuaikan pengetahuan keuangan yang cenderung negatif, serta kurangnya kemampuan dalam menggunakan produk teknologi digital secara aplikatif pada aktivitas sehari-hari merupakan hal-hal yang menyebabkan kemampuan literasi aparaturnya bernilai rata-rata kurang.

Faktor usia, tingkat pendidikan, dan kemudahan dalam menjangkau atau memperoleh fasilitas atau layanan keuangan dan/atau digital dalam aktivitas sehari-hari yang disebut aksesibilitas merupakan faktor-faktor yang ditemukan signifikan memengaruhi nilai literasi aparaturnya dalam penelitian ini sehingga dianggap memiliki kontribusi atas skor penilaian di atas. Terkait faktor usia, perkembangan teknologi digital yang mulai *booming* di era milenial (tahun 1980 ke atas) dan aplikasinya yang selalu *up to date* menjadi hambatan tersendiri bagi aparaturnya di Kabupaten Aceh Tamiang yang berusia rata-rata 44 tahun dengan ± 76 persen berusia >35 tahun, baik persoalan adaptasi maupun menurunnya minat belajar dan fungsi kognitif akibat pertambahan usia. Mayoritas aparaturnya yang berpendidikan SLTA ke bawah yang berjumlah sekitar 70 persen disinyalir juga menjadi penyebab rendahnya nilai literasi rata-rata aparaturnya mengingat kemampuan literasi yang berbanding lurus dengan tingkatan pendidikan formal. Selain itu, ketidaksetaraan aksesibilitas lokasi pertokoan atau pusat perdagangan barang atau jasa digital dan fasilitas keuangan for-

mal, termasuk layanan keuangan *mobile* terhadap pusat desa yang relatif cukup jauh, hampir selalu diikuti dengan kondisi atau ketersediaan kekuatan sinyal ponsel/internet desa/warnet yang minim, diperkirakan juga turut menjadi penyebab kurangnya nilai literasi rata-rata aparaturnya.

Rekomendasi

Rendahnya nilai rata-rata literasi aparaturnya dan temuan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhinya agaknya menimbulkan permasalahan yang cukup serius terhadap kelancaran implementasi program digitalisasi bantuan pemerintah dan desa digital. Diperlukan strategi perencanaan atau penyusunan kebijakan yang tepat guna mengatasi atau setidaknya meminimalisir permasalahan tersebut. Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, ataupun pemangku kepentingan lainnya, seperti institusi keuangan formal, dianjurkan untuk dapat menciptakan kegiatan-kegiatan dengan sasaran aparaturnya yang berorientasi pada peningkatan komponen literasi, seperti: (1) minat dan atensi terhadap dunia keuangan dan perkembangannya; (2) kemampuan menggunakan produk teknologi digital secara aplikatif, baik pada layanan keuangan perbankan maupun bidang pekerjaan; dan (3) pengetahuan dan partisipasi terhadap GNNT dalam rangka keuangan inklusif, baik melalui sosialisasi, pembinaan, penataran, diklat teknis, maupun kesempatan untuk terlibat langsung pada konteks persoalan.

Berdasarkan temuan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi literasi, kepada pemangku kepentingan terkait maupun konstituen atau pemilih –yang dalam konteks ini masyarakat desa– untuk mempertimbangkan batasan usia dan tingkat pendidikan aparaturnya yang ideal dalam mekanisme atau prosedur pemilihan aparaturnya atau pada tingkat yang lebih ekstrem adalah merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, khususnya Pasal 33 yang mengatur persyaratan

wajib calon kepala desa sehingga fungsi kepemimpinan aparatur desa paling efektif dan produktif untuk berjalan.

Sementara itu, terhadap aksesibilitas layanan atau fasilitas keuangan dan digital, pemangku kepentingan terkait hendaknya dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan berorientasi pada perluasan dan keterbukaan aksesibilitas keuangan dan digital, seperti menghilangkan daerah-daerah dengan kategori *blind spot* atau *remote* terkait ketersediaan sinyal selular, kewajiban untuk menyediakan akses internet di kantor desa, mendorong usaha mikro dan kecil yang berencana membuka warung internet di desa-desa dengan memberi kemudahan izin dan bantuan kredit, merangsang pertumbuhan kelompok pertokoan dengan spesialisasi bidang usaha barang dan jasa digital, dan menciptakan sentra-sentra layanan keuangan formal, termasuk layanan keuangan *mobile* yang tidak hanya bersandarkan pada motif dan prinsip ekonomi, tetapi juga aspek pemerataan dan reduksi kesenjangan, khususnya pada desa-desa dengan aksesibilitas yang cukup sulit.

Daftar Pustaka

- [1] Agarwal, S., Driscoll, J. C., Gabaix, X., & Laibson, D. (2009). The age of reason: Financial decisions over the life cycle and implications for regulation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2009(2), 51-117. doi: <https://doi.org/10.1353/eca.0.0067>.
- [2] AJNN.net. (2017, 2 Oktober). *Ini kerugian dana desa akibat ulah dua datok di Aceh Tamiang*. Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://www.ajnn.net/news/ini-kerugian-dana-desa-akibat-ulah-dua-datok-di-aceh-tamiang/index.html>.
- [3] Alkali, Y. E., & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. *CyberPsychology & Behavior*, 7(4), 421-429. doi: <https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.421>.
- [4] Ansong, A., & Gyensare, M. A. (2012). Determinants of university working-students' financial literacy at the University of Cape Coast, Ghana. *International Journal of Business and Management*, 7(9), 126-133. doi: <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n9p126>.
- [5] APJII. (2016). *Infografis penetrasi & perilaku pengguna internet Indonesia: Survey 2016*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>.
- [6] Asrori, A. (2014). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(2), 101-116. doi: <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>.
- [7] Australian Council for Educational Research. (2016). *A global measure of digital and ICT literacy skills*. Background paper prepared for the 2016 Global Education Monitoring Report Education for people and planet: Creating sustainable futures for all, ED/GEMR/MRT/2016/P1/4. UNESCO & GEMR.
- [8] Bank Indonesia. (2016, 20 April). BI dukung implementasi desa digital. *Berita Terkini (Siaran Pers)*. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Dukung-Implementasi-Desa-Digital.aspx>.
- [9] Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Peria, M. S. M. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234-266. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>.
- [10] Carrington, V., & Marsh, J. (2005). Digital childhood and youth: New texts, new literacies. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 26(3), 279-285. doi: <https://doi.org/10.1080/01596300500199890>.
- [11] Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107-128. doi: [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7).
- [12] Covey, S. (2004). *The 7 habits of highly effective people: 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif*. Binarupa Aksara.
- [13] Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global finindex database 2014: Measuring financial inclusion around the world. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7255. The World Bank. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21865>.
- [14] Ebiringa, O. T., & Okorafor, E. O. (2010). Financial Literacy and financial decision making capacity: The gender balance issue. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 12(7), 222-232.
- [15] Eshet-Alkalai, Y., & Chajut, E. (2010). You can teach old dogs new tricks: The factors that affect changes over time in digital literacy. *Journal of Information Technology Education: Research*, 9(1), 173-181.
- [16] European Commission. (2010). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions: A Digital Agenda for Europe. COM(2010)245 final. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do>

- uri=COM:2010:0245:FIN:EN:PDF.
- [17] Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley & Sons.
- [18] Global Findex. (2014). *Global financial inclusion (Global Findex) database*. World Bank. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-inclusion-global-findex-database>.
- [19] Green, D. A., & Riddell, W. C. (2012). Understanding educational impacts: The role of literacy and numeracy skills. In *11th IZA/SOLE Transatlantic Meeting of Labor Economists* [Online]. Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://conference.iza.org/conference.files/TAM2012/riddell.w5670.pdf>.
- [20] Gui, M. (2007). Formal and substantial Internet information skills: The role of socio-demographic differences on the possession of different components of digital literacy. *First Monday*, 12(9), 1-16.
- [21] Hargittai, E. (2005). Survey measures of web-oriented digital literacy. *Social Science Computer Review*, 23(3), 371-379. doi: <https://doi.org/10.1177/0894439305275911>.
- [22] Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: Differences in young adults' use of the internet. *Communication Research*, 35(5), 602-621. doi: <https://doi.org/10.1177/0093650208321782>.
- [23] Huang, J., & Russell, S. (2006). The digital divide and academic achievement. *The Electronic Library*, 24(2), 160-173. doi: <https://doi.org/10.1108/02640470610660350>.
- [24] Karpati, A. (2011). Digital literacy in education. *Policy brief May 2011*. UNESCO Institute for information technologies in Education. Diakses 20 Oktober 2017 dari https://iite.unesco.org/files/policy_briefs/pdf/en/digital_literacy.pdf.
- [25] Kharchenko, O. (2011). *Financial literacy in Ukraine: Determinants and implications for saving behavior* (Master Thesis, Kyiv School of Economic). Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://www.kse.org.ua/uploads/file/library/MAThesis2011/KHARCHENKO.pdf>.
- [26] Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy and retirement planning in the United States. *Journal of Pension Economics & Finance*, 10(4), 509-525. doi: <https://doi.org/10.1017/S147474721100045X>.
- [27] Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 17(1), 76-85. doi: <https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.76-85>.
- [28] Mitzner, T. L., Rogers, W. A., Fisk, A. D., Boot, W. R., Charness, N., Czaja, S. J., & Sharit, J. (2016). Predicting older adults' perceptions about a computer system designed for seniors. *Universal Access in the Information Society*, 15(2), 271-280. doi: <https://doi.org/10.1007/s10209-014-0383-y>.
- [29] Nuryakin, C., Sastiono, P., Maizar, F. A., Amin, P., Yunita, L., Puspita N., Afrizal, M., & Tjen, C. (2017). Financial inclusion through digital financial services and branchless banking: Inclusiveness, challenges and opportunities. *LPEM-FEBUI Working Paper 008*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://www.lpem.org/id/financial-inclusion-digital-financial-services-branchless-banking-inclusiveness-challenges-opportunities/>.
- [30] OECD. (2013). *PISA 2012 financial literacy framework*. Organisation for Economic Cooperation and Development. Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://www.oecd.org/finance/financial-education/PISA2012FrameworkLiteracy.pdf>.
- [31] OECD/INFE. (2015). *2015 OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion*. OECD International Network on Financial Education. Diakses 20 Oktober 2017 dari https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2015.OECD_INFE_Toolkit_Measuring_Financial_Literacy.pdf.
- [32] OJK. (2014). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013*. Otoritas Jasa Keuangan.
- [33] Pew Research Center. (2018). *Internet/broadband fact sheet*. Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://www.pewinternet.org/fact-sheet/internet-broadband/>.
- [34] Potter, W. J. (2015). *Introduction to media literacy* (1st Edition). Sage.
- [35] PPID LAN. (2008). *Executive summary: Kajian peningkatan aparatur desa*. Pejabat Pengelola Informasi Publik Lembaga Administrasi Negara. Diakses 20 Oktober 2017 dari <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Abstrak-Kajian-Aparatur-Desa.pdf>.
- [36] Sari, D. L. (2016). *Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara* (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung).
- [37] Suangi, R. S. (2014). Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kasus di Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(3).
- [38] UAC. (2013). *Digital divide and factors affecting digital literacy: Education essay*. Uni Assignment Centre. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://www.uniassignment.com/essay-samples/education/digital-divide-and-factors-affecting-digital-literacy-education-essay.php?cref=1>.
- [39] UNESCO. (2005). *Education for all: literacy for life. Education for all global monitoring report 2006*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://en.unesco.org/gem-report/report/2006/literacy-life>.
- [40] Villasenor, J. D., West, D. M., & Lewis, R. J. (2016). *The 2016 Brookings financial and digital inclusion project report: Advancing equitable financial ecosystems*. Center for Technology Innovation at Brookings - The Brookings Institution. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://www.brookings.edu/research/>

- the-2016-brookings-financial-and-digital-inclusion-project-report/.
- [41] Wachira, I. M., & Kihui, E. N. (2012). Impact of financial literacy on access to financial services in Kenya. *International Journal of Business and Social Science*, 3(19), 42-50.
- [42] World Bank. (2000). Small states: meeting challenges in the global economy: Report of the Commonwealth Secretariat/World Bank joint task force on small states. *Report 27029*. Diakses 20 Oktober 2017 dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/267231468763824990/small-states-meeting-challenges-in-the-global-economy>.
- [43] World Bank. (2017) *Financial Inclusion: Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity: Overview*. Diakses 5 April 2017 dari <http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>.
- [44] Yamane, T. (1967). *Statistics: An introductory analysis* (2nd Edition). Harper & Row.